

DOKUMEN
PENGUMUMAN

KATEGORI
**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI (SMKK)**

No: 206/D23/DPPP/07/2025
Tanggal: 31 Juli 2025

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

BAB 1 UMUM	2
1.1 Ringkasan Kategori Produk	2
BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK	3
2.1 Syarat Pelaku Usaha	3
2.2 Kategori Produk	4
2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan	5
2.4 Metode E-Purchasing	5
2.5 Jenis Kategori Produk	5
2.6 Kurasi Penayangan Produk	5
2.7 Harga Zonasi	7
2.8 Pengaturan Desimal	7
BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK	8
BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT	9
4.1 Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMK	9
BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA	12
5.1 Varian	12
5.2 Harga Zonasi	12
5.3 Layanan Tambahan	12
5.4 Informasi Lainnya	12

BAB 1
UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

1.	Nama Kategori Produk	:	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa	:	<input type="checkbox"/> Amanat Peraturan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk <input type="checkbox"/> Usulan dari Pelaku Usaha <input checked="" type="checkbox"/> Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga <input type="checkbox"/> Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ● Badan Layanan Umum (BLU) ● Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ● Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ● Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik	:	Kementerian Pekerjaan Umum

BAB 2

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL

KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI yang dipersyaratkan pada seluruh Kategori Produk Tingkat III adalah:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001);
 - b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (37011);
 - c. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021);
 - d. Konstruksi Gedung Hunian (41011);
 - e. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
 - f. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);
 - g. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
 - h. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);
 - i. Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
 - j. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018);
 - k. Konstruksi Gedung Lainnya (41019);
 - l. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (41020);
 - m. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);
 - n. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102);
 - o. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);
 - p. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202);
 - q. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (42203);
 - r. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207);
 - s. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209);
 - t. Konstruksi Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212);
 - u. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911);
 - v. Pengerukan (42914);

- w. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai (42922);
 - x. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930);
 - y. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (42921);
 - z. Penyiapan Lahan (43120);
 - aa. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221);
 - bb. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);
 - cc. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902);
 - dd. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903);
 - ee. Pemasangan Kerangka Baja (43904); atau
 - ff. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
 5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

2.2 Kategori Produk

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Penerapan SMKK	Komponen 1 SMKK (Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK)
		Komponen 2 SMKK (Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan)
		Komponen 3 SMKK (Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri)
		Komponen 4 SMKK (Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi)
		Komponen 5 SMKK (Personel Keselamatan Konstruksi)
		Komponen 6 SMKK (Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)
		Komponen 7 SMKK (Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas)
		Komponen 8 SMKK (Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi)

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
		Komponen 9 SMKK (Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi)

2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II, dan III yang ditetapkan dalam Penelaahan Kategori Produk ini.

2.4 Metode E-Purchasing

Merupakan metode *E-Purchasing* katalog yang berkenaan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK yaitu:

- Negosiasi
- Mini Kompetisi
- Negosiasi dan Mini Kompetisi

Pada seluruh kategori produk tingkat III

2.5 Jenis Kategori Produk

Jenis Kategori Produk Tingkat III:

- Kategori Produk Umum
- Kategori Produk Khusus

Kategori khusus dibuat berdasarkan data Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun data SIPASTI tersebut dapat diakses pada tautan berikut ini:

<https://bit.ly/MasterProductPUv6>.

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Produk terhadap Perizinan Wajib suatu Kategori Produk Tingkat III:

- Ya
- Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kriteria SNI

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria Merek

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

1. Kurasi pada atribut informasi pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik namun data nilai SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator.
2. Produk yang sudah terkurasi dan disetujui oleh kurator akan memiliki informasi SNI dan/atau Merek, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara produk yang dapat dilakukan transaksi diatur lebih pada panduan pengguna.

B. Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Utama

1. Keterangan Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMKK.

- a. Produk ditayangkan oleh Penyedia yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang Masih Berlaku sesuai ketentuan.
- b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki Sertifikat Standar sesuai ketentuan.
- c. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan.
- d. Pengecekan pengisian data PPN pada harga tayang produk sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pengecekan pengisian zonasi harga produk tayang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada butir 2.7 Harga Zonasi.

- f. Pengecekan pengisian satuan pengukuran produk sesuai dengan data satuan pengukuran yang tercantum dalam tautan berikut <https://bit.ly/MasterProductPUv6>.

Keterangan:

1. Kurasi pada atribut informasi utama diatas tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada katalog elektronik, namun terdapat keterangan “Produk masih dalam proses kurasi”. Keterangan tersebut akan hilang jika produk lulus kurasi pada atribut informasi utama diatas dan memiliki *label verified produk*. Namun produk akan turun tayang jika tidak lulus pada atribut informasi utama diatas.
2. PPK/PP dalam melakukan *E-purchasing* wajib melakukan pengecekan produk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.7 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

Ya

Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III Menggunakan Zona Harga Kabupaten/Kota.

2.8 Pengaturan Desimal

Penerapan desimal terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

Ya

Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III menggunakan fitur desimal.

BAB 3
INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

No	Kategori Tingkat I	Informasi Pokok	Informasi Utama	Informasi Lainnya
1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok 9) Informasi Pengiriman	1) Satuan Pengukuran 2) Kode Produk 3) Lingkup Kegiatan 4) Lokasi Layanan (Kecamatan) 5) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 6) Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 7) Sertifikat Standar 8) Komponen Struktur Biaya Tayang	1) Informasi Lainnya

BAB 4
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMKK

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Informasi Pokok		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	SNI	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki.
1.5	Merek	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki.
1.6	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Harga Satuan dan Harga Grosir (Jika ada) Harga menggunakan zonasi Kabupaten/Kota

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.7	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden
2	Informasi Utama		
2.1	Satuan Pengukuran	Wajib Diisi	Pengisian satuan pengukuran saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui halaman panduan pengguna pada tautan Panduan Pengisian atau sesuai dengan informasi pada tautan bit.ly/MasterProductPUv6 . Contoh: Meter Kubik, Meter Persegi, Meter Panjang, Ton, Kilogram, Buah, Liter, Lump Sum, Jam
2.2	Kode Produk	Wajib Diisi	Pengisian kode produk saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui di halaman panduan pengguna pada tautan Panduan Pengisian atau sesuai dengan informasi pada tautan bit.ly/MasterProductPUv6 . Contoh: 1.20.(1)
2.3	Lingkup Kegiatan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Lingkup Kegiatan
2.4	Lokasi Layanan (Kecamatan)	Wajib Diisi	Berisi informasi lokasi yang dilayani oleh Penyedia (tingkat kecamatan) Contoh: Kecamatan Cengkareng, Tambora, Palmerah.

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.5	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi Contoh: Memiliki SBU Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan (File Upload).
2.6	Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
2.7	Sertifikat Standar	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Standar Contoh: Memiliki Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan (File Upload).
2.8	Komponen Struktur Biaya Tayang	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Komponen Struktur Biaya Tayang Contoh: Harga tayang sudah termasuk biaya: Biaya Material/Produksi; Biaya Tenaga Kerja; Biaya Peralatan; Biaya Pengujian Pengendalian Mutu; Biaya Pengerjaan/Pemasangan; Biaya Pengangkutan (bila diperlukan); Biaya Pengepakan (bila diperlukan); dan Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Penyedia dapat mengunggah dokumen komponen struktur biaya tayang.
3	Informasi Lainnya		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan

BAB 5

PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

a. Tipe Varian

Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan

b. Pilihan Varian

Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan

Rincian dari varian dapat diunggah pada kolom unggahan dokumen pendukung lainnya.

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi tidak aktif maka harga tayang produk menggunakan zona harga Nasional, namun apabila fitur harga zonasi diaktifkan maka harga tayang produk dapat menggunakan zona harga Provinsi atau Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

a. Jenis Produk

1. Fisik/Digital
2. Jasa
3. Asuransi

b. Jenis Layanan

Opsi untuk memilih jenis layanan untuk satu layanan atau lebih

c. Pembelian Layanan

Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai

dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang minimal sudah termasuk biaya:
 - a. Retribusi
 - b. Keuntungan
 - c. Pungutan lain yang sah
 - d. Biaya Bea dan Overhead
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
 - f. Pajak Daerah (Jika ada)
 - g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dapat melakukan pembelian produk pada Kategori Tingkat III sesuai dengan metode *E-Purchasing* sesuai dengan butir 2.4 pada BAB 2 Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa dan Profil Kategori Produk Pada Katalog Elektronik.
5. Penyedia Katalog Elektronik dapat dibebankan biaya tambahan pada setiap transaksi *E-Purchasing* yang meliputi:
 - a. PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik;
 - c. Biaya pembayaran (sesuai dengan metode bayar yang dipilih);
 - d. Biaya *disbursement* (sesuai dengan metode bayar yang dipilih); dan
 - e. Biaya lainnya (apabila ada).

Dengan diterbitkannya Dokumen Penelaahan ini, maka Dokumen Penelaahan Kategori Produk Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Nomor 170/D23/DPKP/05/2025 Tanggal 27 Mei 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2025

Direktur Pasar Digital Pengadaan



Yulianto Prihhandoyo

NIP: 197107311998031005